

BAB V

KESIMPULAN

Penyerangan pasukan Belanda ke daerah-daerah sentral kekuatan Republik Indonesia pada 19 Desember berhasil mengamankan pucuk pimpinan Republik Indonesia saat itu dan meduduki wilayah tersebut, dengan ditawannya Presiden dan Wakil Presiden membuat kursi kepemimpinan Republik Indonesia pun menjadi kosong. Kekosongan tersebut yang telah diantisipasi oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mengirimkan kawat yang berisikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan sebuah pemerintahan darurat yang kemudian bernama “Pemerintahan Darurat Republik Indonesia” (PDRI) yang diketuai (atau Presiden) Sjafruddin Prawiranegara.

Keberadaan PDRI dimasa-masa sekaratnya Republik Indonesia akibat serangan pasukan Belanda menjadi jawaban dari segala pertanyaan tentang eksistensi Republik Indonesia saat itu, maka dari itu tanpa adanya PDRI Republik Indonesia bisa saja telah lenyap dari dunia ini. Peranan yang sangat amat menentukan bagi kelangsungan nafas Republik Indonesia menjadikan kisah perjuangan PDRI selayaknya mendapatkan posisi yang sangat tinggi atau sangat penting dalam sejarah nasional Indonesia.

Pada era Orde Lama dan Orde Baru, kisah perjuangan PDRI seakan-akan tidak mendapatkan apresiasi yang seharusnya dari para pemimpin bangsa saat itu, eksistensi PDRI saat itu bisa dikatakan redup bahkan tenggelam akibat kondisi perpolitikan nasional. Akibat adanya ketidakadilan terhadap PDRI munculah usaha-usaha yang

dibentuk untuk menaikan eksistensi PDRI pada tingkat nasional, butuh waktu yang panjang dan banyak rangkaian acara mengenai PDRI hingga diraihnya pengakuan terhadap perjuangan PDRI secara nasional.

Beberapa usaha dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan keadilan terhadap PDRI dan menempatkan PDRI di posisi yang proporsional seperti, Seminar Nasional PDRI pada 25-26 September 1989 di Jakarta, Seminar Nasional PDRI di Padang 22-24 Desember 1993, Kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI 2001 di Sumatra Barat pada 10-13 Juli 2001, Diskusi panel tentang PDRI di Bukittinggi 30 April 2002, Diskusi panel pada peluncuran buku “PDRI Dalam Perang Kemerdekaan”, Seminar Nasional di Universitas Andalas pada 26 Juli 2006.

Dengan banyaknya rangkaian acara seputar PDRI untuk memperjuangkan posisi PDRI pada tingkat nasional, sebuah momentum muncul dalam kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI 2001 di Sumatra Barat yang diadakan pada 10-13 Juli 2001 dengan peserta Keluarga pejuang PDRI, sejarawan, mahasiswa, Ormas-ormas, Lembaga sosial, dan sebagainya. Kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI ini merupakan bentuk atau jenis kegiatan baru mengenai PDRI, kegiatan menelusuri kembali jejak-jejak peninggalan masa PDRI seperti bangunan, benda-benda, dan kisah-kisah PDRI yang berkembang di tengah masyarakat tempat persinggahan PDRI pada masa lampau. Dalam acara penutupan lahirlah sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Bukittinggi dimana seluruh peserta NTN PDRI setuju dan menandatangani sebuah petisi persetujuan terhadap deklarasi tersebut untuk diajukan kepada pemerintah tinggi dan tertinggi di Indonesia. Deklarasi tersebut menyepakati bahwa hari lahir PDRI pada 19 Desember

1948 dapat dijadikan sebagai hari besar nasional yaitu Hari Bela Negara, serta menjadikan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Pemerintahan Republik Indonesia dalam keadaan darurat.

Melalui kegiatan Napak Tilas Nasional PDRI 2001 terbukalah gerbang untuk dijadikannya hari lahir PDRI sebagai Hari Bela Negara, namun masih banyak rangkaian acara seminar seputar PDRI yang diadakan hingga PDRI mendapatkan penganugerahan melalui Kepres No. 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara. Satu bentuk apresiasi terhadap PDRI pada tingkat nasional baru dapat diraih setelah sekian lama diperjuangkan oleh kelompok-kelompok orang yang menghargai jasa-jasa PDRI terhadap Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya hari lahir PDRI sebagai Hari Bela Negara dan harus diperingati setiap tahunnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka sejarah perjuangan PDRI sudah menjadi ingatan kolektif bangsa Indonesia dan dapat menjadi sumber kekuatan untuk memunculkan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan azas persatuan dan kesatuan oleh masyarakat Indonesia, semoga Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar dan bangsa yang bermatabat tanpa melupakan nilai-nilai perjuangan dari pahlawannya di masa lalu.